

**ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYALURAN KREDIT PADA BANK PEMERINTAH
DI INDONESIA PERIODE 1991-2001**

Oleh:
Hj. Roswita. AB
Hj. Enny Muhaini Hanafiah
Rachmad Darmawan

ABSTRACT

The disturbance of banking intermediation or more popular in term disintermediation of credit distribution is reflected by the low position of LDR national banking. The low position of LDR indicates the decrease of banking ability in distributing credit if it is compared to the banking ability in collecting fund from society. For analyzing this problem, the writer used multiple regression linear method. The result of regression research indicated that for the period of 1991-2001, credit distribution is significantly affeted by the number of bank offices variable and inflation level. As the contrary, variable of society fund, credit interest, minimum reserve and exchange rate do not significantly influence toward credit distribution variable for the period 1991-2001.

Keyword: Credit Distribution, Society Fund, Bank Reserve, Number of Bank Offices, Credit Interest Rate, Inflation, Exchange Rate.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terciptanya kinerja bank yang sehat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan dengan tujuan untuk menciptakan kinerja perbankan yang lebih efisien dalam mengelola dana-dana masyarakat, serta menyalurkannya dalam bentuk kredit pada sektor yang benar-benar bermanfaat bagi pembangunan ekonomi.

Usaha pemerintah dalam memajukan perekonomian khususnya dalam dunia perbankan melalui berbagai paket deregulasi tersebut memang telah memberikan hasil

yang baik bagi dunia perbankan. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar menyebabkan kinerja perbankan mulai menurun. Hal ini ditambah lagi dengan dilikuidasinya 16 bank umum swasta pada 1 November 1997 yang diikuti oleh merger dan akuisisi oleh beberapa bank umum dan bank persero, sehingga sempat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Namun langkah tersebut terpaksa diambil karena adanya sistem perbankan yang tidak sehat akibat adanya tumpukan kredit macet dan skandal-skandal intern bank.

Setelah melalui berbagai usaha yang sangat sulit hingga saat ini secara umum kinerja disektor perbankan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah berakhirnya program rekapitalisasi perbankan tahun 2000. Hal ini terutama ditunjukkan dengan membaiknya struktur pemodal pada sektor perbankan, menurunnya tingkat Non Performing Loans (NPLs) dan meningkatnya Net Interest Margin (NIM).

Tabel 1. Indikator Perbankan Nasional

Tahun	INDIKATOR (Triliun Rupiah)								
	Total Asset	Kredit	DPK	Modal	NPL Gross (%)	NPL Net (%)	L/R	NIM	LDR
1998	895,5	487,4	572,5	-129,8	48,6	34,7	-178,6	-73,0	85,14
1999	1006,7	225,1	625,6	-41,2	32,8	7,3	-91,7	-38,6	35,99
2000	1030,5	269,0	720,3	52,3	18,8	5,8	10,5	22,8	37,34
2001	1099,7	307,5	809,1	62,3	12,1	3,6	13,1	37,8	38,02

Sumber: Laporan BI dari berbagai edisi

Namun walaupun kinerja perbankan semakin membaik, dunia perbankan masih dihadapkan pada permasalahan baru yaitu belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan sehingga proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan kembali menemukan hambatan. Dimana tingkat LDR (rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun) untuk tiga tahun terakhir berada kurang dari 50%, ini menunjukkan adanya disintermediasi pada fungsi penyaluran kredit sektor perbankan.

Fungsi intermediasi perbankan yang terganggu tercermin pada rendahnya tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dimiliki oleh perbankan nasional dalam 2 tahun terakhir. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut diantaranya adalah: (BI, 2001: 14)

1. Masih tingginya porsi obligasi pemerintah dalam aset perbankan.
2. Masih berlangsungnya upaya konsolidasi internal perbankan.
3. Lambatnya proses restrukturisasi kredit serta korporasi.
4. Masih rendahnya daya serap sektor riil terhadap kredit perbankan.
5. Perbankan cenderung memilih penanaman modal berjangka waktu pendek dengan resiko yang rendah seperti SBI dan penempatan antar bank.

Rendahnya tingkat LDR (Loan to Deposit Ratio) menunjukkan masih rendahnya tingkat penyaluran kredit jika dibandingkan dengan tingkat dana yang berhasil dihimpun

oleh perbankan. Sehingga kondisi ini dapat menyebabkan keterbatasan pada pembiayaan kegiatan produksi dan investasi, yang akan berdampak pada pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, dalam makalah ini penulis mencoba menganalisis faktor-faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi penyaluran kredit pada Bank Pemerintah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Pemerintah memiliki keamanan dalam hal bersaing. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang berperan sebagai pemilik sekaligus penjamin uang masyarakat yang disimpan di bank pemerintah. Pada kenyataan menunjukkan bahwa jika sebuah bank pemerintah mengalami krisis likuiditas, pemerintah selalu turun tangan memberikan bantuan dana, sehingga bank tersebut tetap dapat berdiri. (Tursina, 2000: 5)

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia selama periode penelitian (1991-2001) dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penyaluran kredit pada bank pemerintah di Indonesia ?

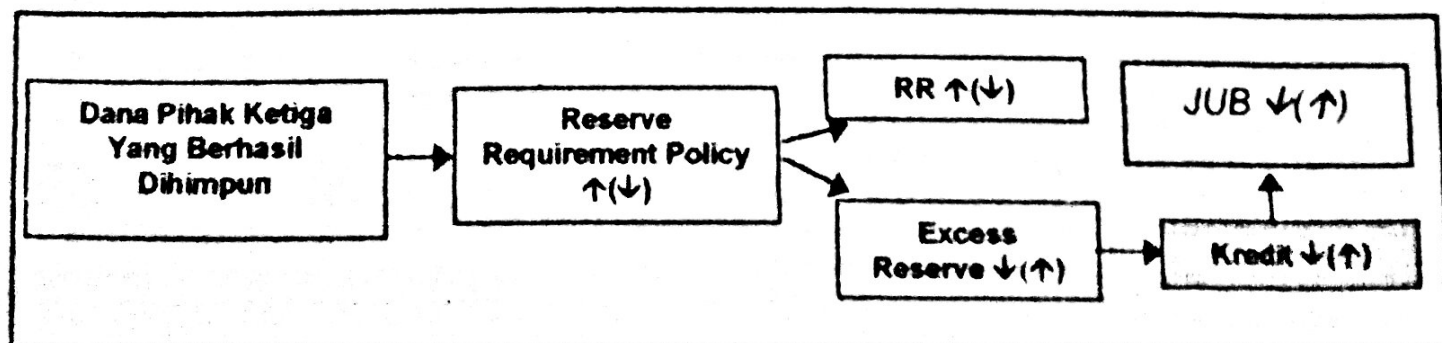
Dengan adanya rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank-bank pemerintah di Indonesia serta menganalisa seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi penyaluran kredit pada bank pemerintah di Indonesia selama periode 1991-2001.

TINJAUAN PUSTAKA

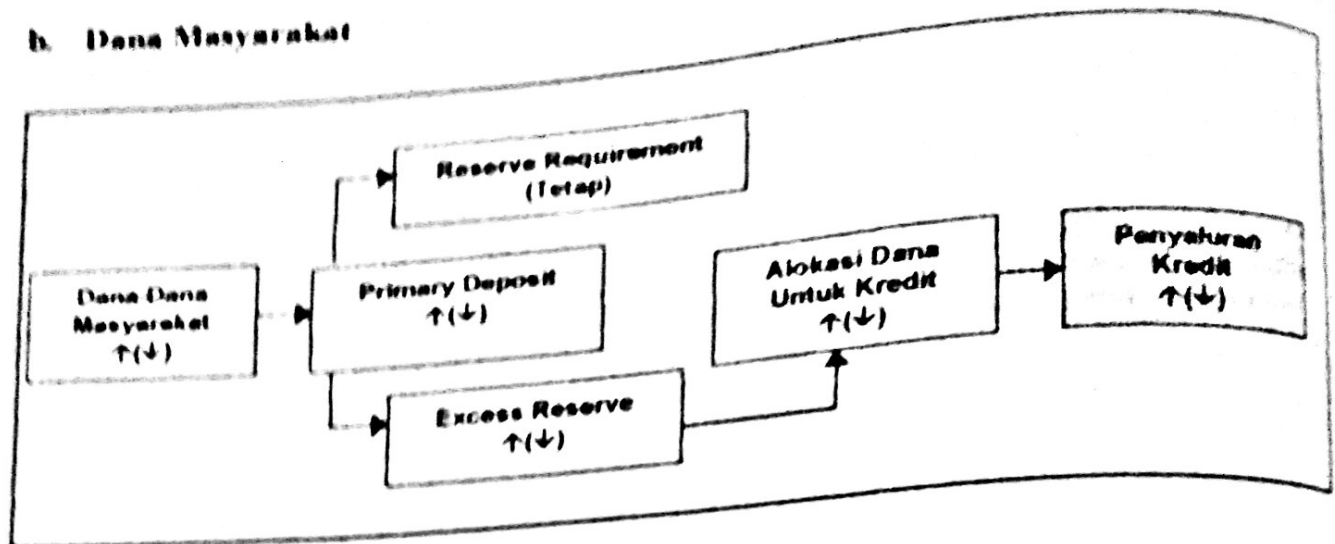
LDR (loan to deposit ratio) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara dana yang berhasil dihimpun terhadap kredit yang disalurkan oleh perbankan. Rendahnya LDR berarti menunjukkan masih rendahnya realisasi kredit oleh sektor perbankan terhadap sektor riil. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Secara sempit kita dapat menganalisis rendahnya penyaluran kredit melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit baik dari sisi permintaan (ekstern) maupun dari sisi penawaran (intern) perbankan.

1. Sisi Penawaran (*Intern*)

a. *Reserve Requirement (RR) / Cash Ratio* atau Cadangan Wajib Minimum



b. Dana Masyarakat

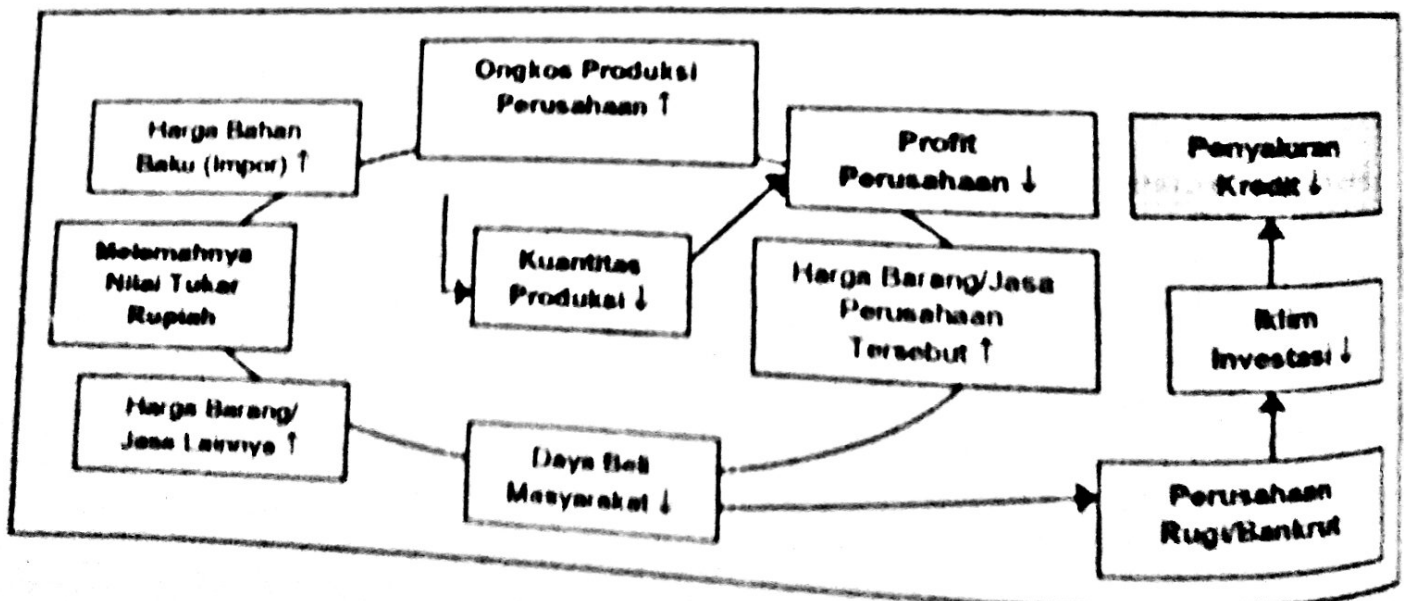


c. Jumlah Kantor Bank

Sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang memberikan kemudahan bagi pembukaan kantor bank, mengakibatkan Indonesia banyak memiliki bank dan kantor cabang bank yang dapat melayani masyarakat dalam bidang keuangan. Sehingga semakin besar pula kemungkinan pengakumulasian dana masyarakat dari berbagai daerah dan tempat. Meningkatnya jumlah dana yang berhasil dihimpun menyebabkan meningkatnya kemungkinan realisasi kredit pada masyarakat. Selain itu pemerataan penyebaran pendapatan semakin meningkat.

2. Sisi Permintaan (Ekstern)

a. Nilai Tukar dan Inflasi

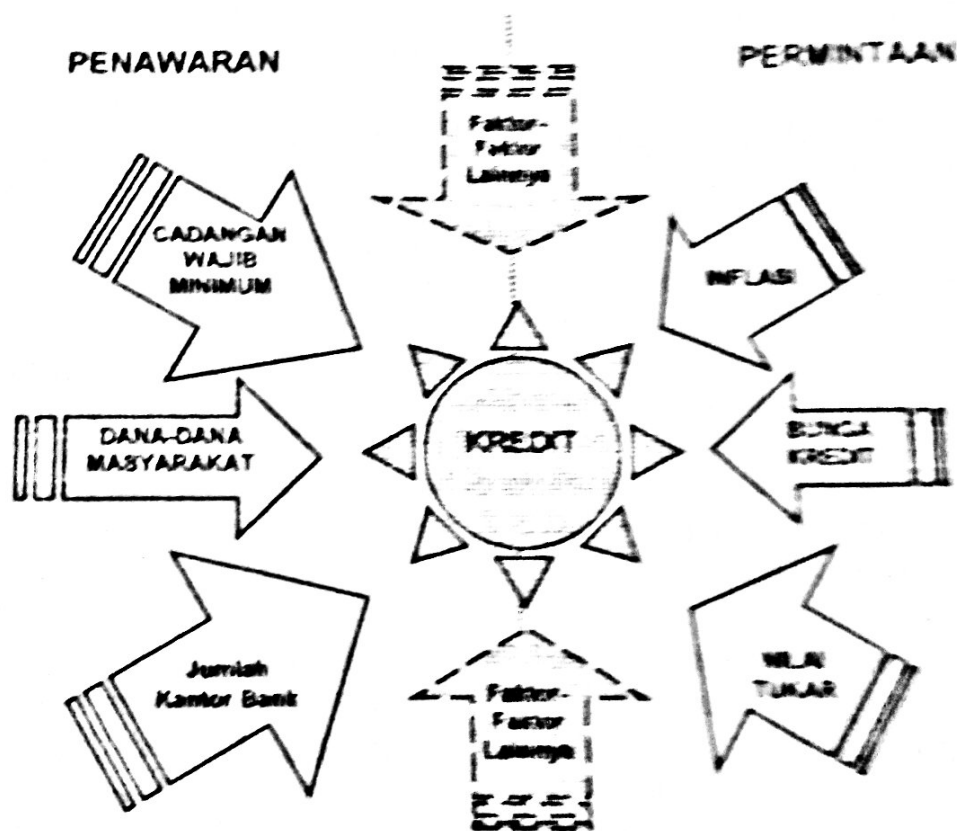


b. Tingkat Bunga Kredit

Pada saat tingkat bunga kredit tinggi, maka permintaan terhadap penyaluran kredit cenderung menurun karena biaya yang bakal dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut menjadi lebih besar.

Secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank pemerintah dapat kita gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan



METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank pemerintah pada periode 1991 - 2001 dengan data dan seri perkembangan data yang dihimpun dalam bentuk rupiah pada periode tersebut, giro wajib minimum, jumlah kantor bank pemerintah, bunga kredit, nilai tukar dan inflasi serta perkembangan penyaluran kredit dalam bentuk rupiah oleh bank-bank pemerintah.

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan, baik dari Bank Indonesia maupun dari Biro Pusat Statistik. Sedangkan untuk menunjang data kuantitatif maka laporan yang diperoleh dan digunakan adalah laporan tahunan, pada kurun waktu 1991 - 2001 baik untuk dana yang dihimpun, tingkat bunga kredit, giro wajib minimum bank-bank umum, jumlah kantor bank pemerintah, tingkat inflasi dan nilai tukar serta penyaluran kredit pada bank pemerintah.

Teknik analisis Kuantitatif digunakan sebagai pendukung dan memperkuat argumentasi dari rangkaian analisis kualitatif.

Untuk menguji hipotesis bahwa kenaikan dana yang dihimpun, jumlah kantor bank pemerintah dan nilai tukar akan mengakibatkan kenaikan jumlah penyaluran kredit bank pemerintah, serta kenaikan tingkat bunga kredit, tingkat inflasi dan cadangan wajib minimum akan mengakibatkan penurunan jumlah penyaluran kredit bank pemerintah. Akan digunakan model regresi dengan tujuan untuk mengukur intensitas hubungan diantara variabel-variabel tersebut.

Formula dasar menggunakan :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e_i$$

Dimana:

- Y = Penyaluran kredit rupiah pada bank pemerintah
- X₁ = Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah yang dihimpun pada bank pemerintah
- X₂ = Tingkat bunga kredit investasi yang berlaku pada bank pemerintah
- X₃ = Cadangan wajib minimum pada bank pemerintah
- X₄ = Jumlah kantor bank pemerintah (tidak termasuk BPD)
- X₅ = Tingkat Inflasi yang berlaku di Indonesia
- X₆ = Nilai Tukar rupiah terhadap dolar US
- e_i = Random error

Untuk mengetahui apakah hipotesa tersebut diterima atau ditolak, maka digunakan uji-t (t-test). Jika t-hitung > t-tabel, maka H₀ ditolak dan pengaruhnya signifikan, begitu pula sebaliknya jika t-hitung < t-tabel, maka H₀ diterima dan pengaruhnya tidak signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penyaluran Kredit Pada Bank Pemerintah di Indonesia

Pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila diperhatikan neraca bank, maka akan terlihat dimana sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian pula jika diamati sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah pendapatan bunga dan posisi kredit.

Perkembangan kredit rupiah selama kurun waktu 1991-2001 telah mengalami pertumbuhan dari Rp.52.628 milyar menjadi Rp.83.122 atau terjadi pertumbuhan sebesar

57,94%. Pertumbuhan kredit yang sangat lambat tersebut terutama diakibatkan karena menurunnya secara tajam penyaluran kredit pada tahun 1999 yaitu sebesar 47,51%.

Pada tahun 1991 posisi kredit sebesar Rp.52.628 milyar. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1992 terjadi kenaikan pada pertumbuhan kredit sebesar 10,46%. Kenaikan pertumbuhan ini terus berlangsung hingga tahun 1998 dengan posisi Rp.160.113 milyar atau meningkat sebesar 41,15% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. Posisi Kredit Rupiah Bank Pemerintah Tahun 1991- 2001 (milyar rupiah)

Tahun	Kredit	Pertumbuhan (%)
1991	52.628	-
1992	58.133	10,46
1993	59.738	2,76
1994	68.085	13,97
1995	79.394	16,61
1996	89.688	12,97
1997	113.436	26,48
1998	160.113	41,15
1999	84.038	-47,51
2000	68.489	-18,50
2001	83.122	21,37

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Edisi

Namun pada tahun 1999 penyaluran kredit pada bank pemerintah mengalami penurunan drastis yaitu sebesar 47,51%. Sama halnya dengan permasalahan perbankan nasional secara umum, penurunan drastis pada penyaluran kredit ini juga disebabkan oleh kompleksitas permasalahan yang menerpa dunia perbankan. Penurunan penyaluran kredit juga terjadi pada tahun 2000, dimana penyaluran kredit turun sebesar 18,50%, atau menjadi sebesar Rp.68.489 milyar. Namun pada tahun 2001 posisi penyaluran kredit kembali mengalami peningkatan sebesar 21,37% atau meningkat menjadi Rp.83.122 milyar.

Penurunan kredit yang cukup tajam pada 1998/1999 ini karena kondisi sektor riil yang sedang mengalami resesi, atau telah terjadi Credit Crunch yaitu suatu fenomena yang menyebabkan bank-bank enggan untuk memberikan kredit atau pinjaman ke sektor swasta. Credit Crunch ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor-faktor supply, seperti lemahnya kemampuan bank untuk memberikan kredit karena masalah permodalan atau menurunnya kualitas kredit debitur. Pada tahun 2001 adanya peningkatan pada penyaluran kredit pada bank pemerintah sebesar 21,37% atau meningkat menjadi Rp.83.122 milyar dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 kredit mengalami penurunan sebesar 18,50% atau pada posisi Rp.68.489 milyar. Peningkatan ini diantaranya disebabkan adanya penyaluran kredit baru dan penjualan kembali kredit yang telah direstrukturisasi oleh BPPN, penghapusbukuan dan penjualan kredit (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2001: 156).

Walaupun kredit meningkat, namun Loan to Deposit ratio (LDR) pada bank pemerintah masih tercatat tidak mengalami perubahan yang menggembirakan dibandingkan

pada tahun-tahun sebelumnya. Dari tabel 3, tampak bahwa selama kurun waktu 1991-1998 pertumbuhan LDR masih berada pada posisi yang tinggi yang berkisar antara 75%-150% seiring dengan derasnya permintaan penyaluran kredit pada bank pemerintah. Namun pada tahun 1999 LDR merosot tajam menjadi sebesar 35,95%. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun berikutnya yaitu tahun 2000 dimana posisi LDR hanya sebesar 25,33%. Sedangkan pada tahun 2001 posisi LDR sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 26,08%.

Tabel 3. Pertumbuhan Loan to Deposit Ratio (LDR) Pada Bank Pemerintah di Indonesia Periode 1991-2001

Tahun	Dana Pihak Ketiga (milyar Rp)	Penyaluran Kredit (milyar Rp)	LDR Bank Pemerintah (%)	LDR Nasional (%)
1991	34.326	52.628	153,32	118,62
1992	42.161	58.133	137,88	107,02
1993	50.258	59.738	118,86	105,32
1994	52.394	68.085	129,95	110,84
1995	63.385	79.394	125,26	109,24
1996	76.165	89.688	117,75	103,98
1997	93.249	113.436	121,65	105,74
1998	211.087	160.113	75,85	85,14
1999	233.773	84.038	35,95	35,99
2000	270.400	68.489	25,33	37,34
2001	318.760	83.122	26,08	38,02

Sumber: Diolah dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

Dari tabel ini juga dapat dilihat perbandingan antara posisi LDR bank pemerintah dan LDR perbankan nasional. Selama kurun waktu 1991-1997 sebelum terjadi krisis ekonomi, LDR bank pemerintah tampak lebih tinggi jika dibandingkan dengan LDR perbankan nasional. Sebab dalam hal ini bank pemerintah berupaya menjalankan fungsinya sebagai "lending" kepada sektor-sektor ekonomi terutama sektor UKM (usaha kecil menengah). Konon masyarakat lebih memilih untuk memperoleh kredit ke bank pemerintah dikarenakan proses peminjaman yang relatif lebih mudah dari pada bank swasta serta bunga kredit yang relatif terjangkau.

Namun sejak empat tahun terakhir (1998-2001), seiring dengan terganggunya fungsi intermediasi perbankan nasional, hal yang sama terjadi pada bank pemerintah. Bahkan pada tabel ini dapat dilihat bahwa posisi LDR bank pemerintah dibandingkan dengan perbankan nasional masih sedikit lebih rendah. Untuk tahun 2000 posisi LDR perbankan nasional mencapai 37,34% sedangkan LDR bank pemerintah hanya 25,33%. Begitu pula tahun 2001 posisi LDR bank pemerintah 38,02% sedangkan LDR bank pemerintah hanya 26,08%. Ini menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir posisi LDR bank pemerintah masih berada di bawah LDR perbankan nasional. Ini berarti secara kumulatif justru bank pemerintah mengalami disintermediasi kredit yang lebih parah dibandingkan dengan bank lainnya, artinya realisasi kredit pada bank pemerintah secara riil masih jauh dari optimal dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya.

Rendahnya LDR ini mengindikasikan bahwa bank pemerintah selama kurun waktu 1999-2001 belum menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal, mencerminkan bahwa saat ini bank pemerintah sedang menghadapi permasalahan disintermediasi pada penyaluran kredit. Secara potensial LDR tersebut sebenarnya masih dapat ditingkatkan apabila komitmen kredit yang telah disediakan oleh bank pemerintah dapat ditarik secara maksimal oleh nasabah.

Pada tabel tampak bahwa meskipun penyaluran kredit mengalami penurunan tajam selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 1999-2000. Namun pada tahun 2001 penyaluran kredit kembali mengalami peningkatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa bank pemerintah sudah cukup ekspansif dalam penyaluran kredit, namun pada kenyataannya dari sisi permintaan kredit, debitur belum mampu menyerap kredit yang telah disediakan. Hal ini disebabkan masih tingginya resiko dunia usaha sehubungan dengan belum kondusifnya kondisi makro ekonomi yang tercermin pada terdepresiasinya nilai tukar dalam negeri, tingginya inflasi dan tingginya suku bunga, serta belum stabilnya kondisi sosial politik dan keamanan.

Perkembangan Dana Yang Dihimpun Oleh Bank Pemerintah di Indonesia

Selama tahun 1991 hingga 2001 laju penghimpunan dana masyarakat pada bank pemerintah terus meningkat. (Tabel 4). Pertumbuhan akumulasi dana terus terjadi dari tahun 1991 hingga tahun 2001. Persentase pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 1997/1998, dimana pada tahun 1997 dana yang berhasil dihimpun oleh bank pemerintah sebesar Rp.93.249 milyar meningkat menjadi Rp.211.087 milyar pada tahun 1998, atau terjadi peningkatan sebesar 126,37%. Peningkatan yang sangat besar ini terjadi merupakan dampak dari adanya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank-bank swasta sangat mempengaruhi pertumbuhan dana pada bank-bank pemerintah, dimana hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan dana yang sangat besar pada bank pemerintah.

**Tabel 4. Posisi Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Rupiah
Pada Bank Pemerintah di Indonesia Periode 1991-2001 (Milyar Rupiah)**

Tahun	Dana Yang Dihimpun			Total	Pertumbuhan (%)
	Giro	Deposito	Tabungan		
1991	9.502	18.091	6.733	34.326	-
1992	9.281	22.184	10.696	42.161	22,83
1993	11.009	23.423	15.826	50.258	19,20
1994	12.363	21.506	18.525	52.394	4,25
1995	13.659	29.421	20.305	63.385	20,98
1996	15.536	35.700	24.929	76.165	20,16
1997	17.492	46.183	29.574	93.249	22,43
1998	24.751	152.033	34.303	211.087	126,37
1999	25.407	153.322	55.044	233.773	10,75
2000	49.205	152.069	69.126	270.400	15,67
2001	54.256	184.821	79.683	318.760	17,88

Sumber: Statistik Indikator Usaha Perbankan Indonesia

Adanya keinginan untuk memperoleh jaminan rasa aman akan dana-dana masyarakat yang mendorong masyarakat untuk mengalihkan dananya pada bank-bank pemerintah. Namun seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang diiringi dengan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, saat ini masyarakat sudah mulai berani menempatkan dananya pada bank-bank umum swasta nasional. Sehingga pertumbuhan akumulasi dana pada bank pemerintah menurun berkisar antara 5-13% hingga akhir tahun 2001.

Perkembangan Tingkat Bunga Kredit Investasi yang Berlaku Pada Bank-Bank Persero di Indonesia

Tingkat bunga kredit yang wajar adalah tingkat bunga yang didalamnya telah menampung besarnya spread yang dikehendaki. Karena itu pengaturan besarnya spread harus tepat agar disatu sisi bank memperoleh margin keuntungan yang layak, dan disisi lainnya harus terjangkau dan kompetitif bagi pemakai kredit. Karena itu besarnya spread yang dikehendaki setidaknya harus dapat menutup biaya overhead dan resiko kredit.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tingkat bunga kredit investasi yang ditetapkan oleh Bank Persero pada tahun 1991 sebesar 21,14%. Sedangkan pada Bank Swasta nasional menetapkan tingkat bunga sebesar 21,13%, begitu pula pada masing-masing bank pemerintah daerah dan bank campuran/asing masing-masing menetapkan tingkat bunga kredit sebesar 19,65% dan 23,08%. Pada tahun 1992 tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Pemerintah turun menjadi 18,80%, sedangkan pada Bank Swasta justru meningkat menjadi 21,45%. Penurunan tingkat bunga kredit pada bank pemerintah terus terjadi hingga pada tahun 1995 yaitu sebesar 14,51%. Pada saat yang sama tingkat bunga kredit pada Bank Swasta Nasional sebesar 19,79%.

Tabel 5. Posisi Tingkat Bunga Kredit Investasi yang Berlaku Pada Bank Umum di Indonesia Periode 1991-2001

Tahun	Bank Persero (%)	Bank Swasta Nasional (%)	Bank Pemerintah Daerah (%)	Bank Asing dan Bank Campuran (%)
1991	21,14	21,13	19,65	23,08
1992	18,80	21,45	19,00	22,37
1993	16,34	20,54	18,83	20,44
1994	14,25	18,14	17,14	18,17
1995	14,51	19,79	16,54	18,86
1996	15,08	19,78	15,41	19,68
1997	15,37	22,04	15,31	21,00
1998	19,39	36,10	15,99	34,89
1999	20,97	32,93	14,86	34,12
2000	16,35	18,04	16,23	15,62
2001	17,11	19,02	17,76	18,55

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Berbagai Edisi.

Namun untuk tahun berikutnya yaitu tahun 1996 tingkat bunga kredit investasi kembali mengalami peningkatan menjadi 15,08%, sedangkan Bank Swasta Nasional pada saat yang sama mengalami penurunan tipis yaitu sebesar 19,78%. Kenaikan tingkat bunga kredit investasi terus berlanjut hingga krisis moneter terjadi di Indonesia yaitu pada 1997-1998. Pada tahun 1998 terjadi kenaikan tingkat bunga yang cukup signifikan yaitu sebesar 19,39%. Begitu pula pada Bank Swasta Nasional juga terjadi peningkatan tingkat bunga kredit yang sangat drastis yaitu menjadi sebesar 36,10%, dimana kenaikan ini merupakan kenaikan terbesar selama periode penelitian. Hal yang sama juga terjadi pada Bank Asing dan Bank Campuran yaitu meningkat sebesar 34,89%. Berbeda dengan tingkat bunga pada Bank Pemerintah Daerah yang juga mengalami peningkatan namun dengan persentase yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 15,99%. Kenaikan tingkat bunga kredit ini terus bertahan hingga pada tahun berikutnya yaitu tahun 1999 pada masing-masing bank umum. Namun pada tahun 2000, seiring dengan berlangsungnya proses pemulihan ekonomi tingkat bunga kredit investasi pada tiap-tiap bank kembali stabil (menurun). Selain itu penurunan tingkat bunga kredit tersebut juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan dunia perbankan yaitu adanya disintermediasi penyaluran kredit pada bank-bank umum. Penurunan tingkat bunga tersebut diharapkan dapat memancing minat masyarakat untuk kembali menggunakan fasilitas kredit yang selama beberapa tahun ini sempat menurun akibat adanya tingkat bunga kredit yang tinggi.

Pada dasarnya kenaikan tingkat bunga kredit ini dapat dimaklumi terutama pada Bank Swasta Nasional sebab disamping kebijakan menekan tingkat inflasi melalui kebijakan menaikkan tingkat bunga (Rediscount Policy), tingginya tingkat bunga kredit juga disebabkan mahalanya Cost of Loanable Funds yang dikeluarkan oleh bank-bank umum untuk memperoleh dana segar masyarakat di masa yang sulit seperti sekarang ini. Cost of loanable Funds merupakan biaya yang dibutuhkan oleh perbankan untuk memperoleh sumber dana. Cost of loanable funds ini terdiri dari biaya overhead dan resiko kredit. Karena itu dalam penentuan bunga, spread yang diperoleh harus dapat menutupi biaya overhead dan resiko kredit. Meningkatnya biaya overhead dan resiko kredit secara langsung mempengaruhi naiknya tingkat suku bunga kredit saat ini.

Perkembangan Cadangan Wajib Minimum Pada Bank Persero di Indonesia

Tiap bank wajib memelihara sejumlah dana yang dipergunakan sebagai cadangan untuk memenuhi permintaan masyarakat atas dana yang disimpannya. (Tabel 6). Meskipun tingkat cadangan minimum (RR) selama kurun waktu 1991-1994 terus mengalami penurunan, namun posisi RR masih berada diatas ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 2%. Namun pada tahun 1995 ketentuan cadangan minimum (RR) diubah menjadi Giro Wajib Minimum (GWM) dan ketentuan besarnya cadangan dinaikan sebesar 3%. Jika dilihat pada tabel diatas, pada tahun 1995 jauh berada dibawah ketentuan yaitu sebesar 1,17%. Rendahnya pertumbuhan GWM ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan dana yang dihimpun pada tahun tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan pertumbuhan saldo giro pada Bank Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari pergeseran pangsa pasar penghimpunan dana pihak ketiga Bank Pemerintah ke Bank Swasta. Tahun berikutnya posisi GWM meningkat menjadi 3,49%, menunjukkan peningkatan persentase pengumpulan dana.

Tabel 6. Posisi Cadangan Wajib Minimum Dalam Rupiah Pada Bank Persero di Indonesia Periode 1991-2001 (Miliar Rp)

Tahun	Alat Liquid			Dana Yang Dihimpun				RR/GWM (%)
	Kas	Giro Pada BI	Total	Giro	Deposito	Tabungan	Total	
1991	852	760	1.612	9.502	18.091	6.733	34.326	4,70
1992	898	880	1.778	9.281	22.184	10.696	42.161	4,22
1993	945	570	1.515	11.009	23.423	15.826	50.258	3,01
1994	1.024	472	1.496	12.363	21.506	18.525	52.394	2,86
1995	1.296	742	2.038	13.659	29.421	20.305	63.385	1,17
1996	1.526	2.660	4.186	15.536	35.700	24.929	76.165	3,49
1997	1.927	5.094	7.021	17.492	46.183	29.574	93.249	5,46
1998	2.328	11.871	14.199	24.751	152.033	34.303	211.087	5,62
1999	5.390	12.596	17.986	25.407	153.322	55.044	233.773	5,39
2000	6.409	15.084	21.493	49.205	152.069	69.126	270.400	5,58
2001	5.495	16.438	21.933	54.256	184.821	79.683	318.760	5,16

Sumber: Diolah dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Edisi

Untuk tahun 1997 hingga 2001 posisi GWM relatif stabil yaitu berkisar antara 5,16% hingga 5,62%. Sejak tahun 1997 posisi GWM dinaikan sebesar 5%, jadi berdasarkan tabel diatas bahwa secara rata-rata bank pemerintah telah memenuhi ketentuan GWM pemerintah, artinya adanya kelebihan kelebihan likuiditas yang menunjukkan bahwa likuiditas bank pemerintah tersebut tetap terjaga.

Perkembangan Jumlah Kantor Bank Persero di Indonesia

Bank-bank umum di Indonesia pada umumnya menggunakan Branch Banking System dimana ada kantor pusat dan beberapa kantor cabang di kota lain dengan sistem manajemen modern yang terpadu, berencana dan desentralisasi kewenangan dana serta kredit. (Tabel 7).

Jumlah bank persero sejak diberlakukannya Paket Oktober 1988 tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebanyak tujuh buah bank. Sedangkan jumlah kantor bank terus mengalami peningkatan. Ketujuh buah bank tersebut antara lain: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (Bank EXIM).

Pada tahun 1991 jumlah Bank Persero sebanyak 7 Bank dengan jumlah kantor bank sebanyak 1.044 kantor. Pada tahun 1992 dengan jumlah bank tetap, terjadi peningkatan jumlah kantor bank menjadi 1.066 kantor. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 1998 dengan posisi 7 bank dan dengan jumlah kantor bank sebanyak 1.602 kantor.

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Kantor Bank Persero di Indonesia, 1991-2001

Tahun	Bank	Kantor Bank
1991	7	1.044
1992	7	1.066
1993	7	1.076
1994	7	1.171
1995	7	1.301
1996	7	1.372
1997	7	1.527
1998	7	1.602
1999	5	1.579
2000	5	1.506
2001	5	1.522

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Berbagai Edisi

Namun pada tahun 1999 jumlah bank persero berkurang hingga menjadi 5 bank, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah kantor bank menjadi 1.579 kantor bank. Penyusutan jumlah bank tersebut terjadi karena adanya Merger pada bank-bank pemerintah, yaitu BBD, BAPINDO, Bank EXIM dan BDN dimerger menjadi Bank Mandiri. Sehingga jumlah bank menyusut dari 7 buah bank menjadi 5 buah bank. Pada tahun 2000 jumlah kantor bank semakin menyusut menjadi 1.506 kantor bank. Sedangkan pada tahun 2001 jumlah kantor bank pemerintah kembali bertambah sebanyak 1.522 kantor bank seiring dengan berlangsungnya proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Peningkatan ini dimaksudkan sebagai upaya bank untuk meningkatkan pelayanan dan ekspansi usaha.

Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 1991-2001

Pada umumnya perkembangan inflasi di Indonesia relatif stabil, yaitu masih dibawah satu digit, hingga pada tahun 1997 datang krisis ekonomi yang menerpa Indonesia sehingga laju inflasi meningkat tajam. Untuk melihat perkembangan inflasi di Indonesia selama periode 1991-2001 dapat dilihat pada tabel ini.

Tingkat inflasi di Indonesia pada saat sebelum terjadi krisis selalu terkendali pada level satu digit. Pada tahun 1991 tingkat inflasi yang berlaku di Indonesia masih berada dalam satu digit yaitu sebesar 9,52%. Namun pada tahun 1992 tingkat inflasi menurun cukup tajam yaitu sebesar 4,94%. Naik turunnya tingkat inflasi ini masih berlangsung terkendali dimana kondisi inflasi masih berada di bawah satu digit hingga tahun 1996, dimana pada tahun tersebut tingkat inflasi hanya sebesar 6,47%.

Namun pada tahun 1997 dimana saat krisis ekonomi mulai merambah Indonesia, laju inflasi melonjak melampaui dua digit. Pada tahun 1997 tingkat inflasi meningkat menjadi sebesar 11,05%. Puncak lonjakan inflasi terbesar terjadi pada tahun 1998 dimana tingkat inflasi pada saat itu meningkat tajam menjadi 77,63%. Kenaikan ini merupakan dampak langsung dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar US, dimana pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi hingga menyentuh titik terendah yaitu diatas Rp.10.000/dollar

US. Tentu saja ini berdampak langsung terhadap kenaikan harga-harga barang umum terutama barang-barang impor dan barang-barang yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku impor. Selain itu ekspektasi negatif masyarakat mendorong maraknya kegiatan menimbun sembako, sehingga supply produk-produk sembako di pasaran menurun bahkan sempat menghangat, akibatnya harga sembako melambung tinggi. Hal ini sangat berdampak pada gejolak sosial pada masyarakat yang berbuntut pada meletusnya berbagai kerusuhan akibat ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah.

Tabel 8. Tingkat Inflasi Yang Berlaku di Indonesia, 1991-2001

Tahun	Tingkat Inflasi (%)
1991	9,52
1992	4,94
1993	9,77
1994	9,24
1995	8,64
1996	6,47
1997	11,05
1998	77,63
1999	2,01
2000	9,35
2001	12,55

Sumber: Laporan Biro Pusat Statistik, Berbagai Edisi

Setelah perekonomian menuju kearah pemulihan pada tahun 1999 inflasi turun secara tajam menjadi 2,01%. Meskipun dampak dari kenaikan inflasi tahun 1998/1999 dimana harga melambung tinggi namun pada tahun 1999 tingkat inflasi turun tajam menjadi 2,01%. Walaupun penurunan angka inflasi ini tidak berarti menurunkan harga barang-barang secara nominal yang telah terlanjur naik, namun secara riil untuk kedepan dapat diupayakan untuk menekan pendapatan masyarakat sehingga secara riil dampak inflasi terhadap masyarakat dapat dikurangi. Pada kondisi inflasi yang rendah kenaikan harga-harga barang relatif dapat dikendalikan, selain itu pemerintah juga mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat.

Tahun 2000 tingkat inflasi kembali meningkat namun berada pada level yang terkendali yaitu sebesar 9,35%. Kenaikan ini diperkirakan merupakan dampak dari kebijakan pemerintah dibidang harga dan pendapatan, kembali melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya ekspektasi inflasi. Pada tahun 2001 tingkat inflasi kembali melampaui dua digit yaitu telah mencapai 12,55%. Tingkat inflasi pada tahun 2001 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2000. Adapun faktor penyebab tingginya inflasi tahun 2001 ini adalah kebijaksanaan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pertengahan Juni 2001 yang diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik dan kenaikan tarif pulsa telepon (Laporan Perekonomian Indonesia; 2001: 15).

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar US

Berdasarkan tabel berikut, pada periode 1991-2001 terlihat bahwa kurs dollar US terhadap rupiah terus meningkat. Atau dengan kata lain, dalam periode tersebut, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi terkecuali untuk tahun 1999, dimana rupiah menguat sebesar 11,53%. Untuk melihat perkembangan kurs rupiah terhadap dollar US dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Kurs Tengah Rupiah Terhadap Dollar US, Periode 1991-2001

Tahun	Kurs Rupiah per 1 Dollar (Rp)	Laju Depresiasi (%)
1991	1.997	4,83
1992	2.074	3,86
1993	2.110	1,74
1994	2.200	4,27
1995	2.308	4,91
1996	2.383	3,25
1997	4.650	95,13
1998	8.025	72,58
1999	7.100	-11,53
2000	9.595	35,14
2001	10.435	8,75

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia, Berbagai Edisi

Pada tahun 1991 nilai tukar rupiah untuk 1 dollar US hanya Rp.1.997,-, maka pada tahun 2001 nilai tukar rupiah terhadap dollar US telah mencapai Rp.10.435,-. Ini berarti selama periode 1991 hingga 2001 rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 422,53%. Permintaan akan dollar US tidak hanya bersumber untuk pembayaran impor, tapi juga untuk pembayaran cicilan dan bunga hutang pemerintah dan swasta pada luar negeri yang telah jatuh tempo.

Pada tahun 1992 dollar US meningkat menjadi Rp.2.074 atau meningkat sebesar 3,86% dari tahun sebelumnya. Begitu pula untuk tahun berikutnya dollar kembali meningkat menjadi Rp.2.110, namun dengan persentase peningkatan yang lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,74%.

Pada tahun 1994 nilai tukar untuk 1 dollar US telah menjadi Rp.2.200 atau terjadi peningkatan sebesar 4,27%. Gejolak pasar valuta asing ini dipicu oleh para pengelola dana asing yang berupaya menarik keuntungan jangka pendek atas dana-dana yang mereka investasikan di Indonesia.

Sementara itu, pada tahun 1995 rupiah terus terdepresiasi terhadap dollar US, dengan laju pertumbuhan 4,91%, sehingga nilai tukar mencapai Rp.2.308 untuk tiap dollar US. Kondisi ini berkaitan dengan merebaknya dampak krisis keuangan Mexico. Pada masa globalisasi dunia sekarang, krisis ekonomi yang terjadi pada suatu negara cenderung akan mempengaruhi negara

Pada tahun 1996, nilai tukar meningkat menjadi Rp.2.383 per dollar US, atau meningkat sebesar 3,25%. Pada tahun tersebut nilai tukar rupiah terhadap dollar US mengalami

depresiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh derasnya arus modal masuk ke Indonesia, ini merupakan cerminan bahwa masih tingginya kepercayaan para pelaku pasar terhadap kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Selain itu arus modal tersebut juga disebabkan oleh masih menariknya penanaman dalam bentuk rupiah oleh investor asing sehubungan dengan masih relatif tingginya perbedaan antara suku bunga dalam dan luar negeri, meskipun telah mulai menunjukkan penurunan.

Pada tahun 1997, merupakan puncak terdepresiasinya rupiah secara tajam, dimana nilai tukar rupiah per 1 dollar Us pada saat itu mencapai Rp.4.650 atau terdepresiasi sebesar 95,13%. Hal ini merupakan laju depresiasi kurs rupiah terhadap dollar US tertinggi pada periode 1991-2001.

Terdepresiasinya nilai tukar rupiah hingga 95,13% pada tahun 1997 ini dipicu oleh gejolak yang berasal dari sisi permintaan dan penawaran (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1997: 73). Dari sisi permintaan terdapat enam Faktor, yaitu:

- 1) Efek menular (*contagion effect*) krisis keuangan dan moneter di Thailand. Hal ini berkaitan dengan tindakan investor asing mengalihkan penanaman dana ke luar dari ASEAN karena menganggap negara-negara ASEAN memiliki masalah yang sama.
- 2) Meningkatnya permintaan terhadap dollar US yang berkaitan dengan besarnya kewajiban luar negeri pihak swasta yang jatuh tempo. Juga didorong oleh kenaikan kebutuhan untuk melakukan lindung nilai (*hedge*) pinjaman swasta luar negeri yang belum di-*hedge*.
- 3) Maraknya spekulasi pelaku pasar di dalam dan di luar negeri yang dapat dilakukan dengan cara yang relatif mudah, mengingat semakin berkembangnya transaksi derivatif dan esatnya internasionalisasi rupiah.
- 4) Berkurangnya kepercayaan investor terhadap prospek dan kemampuan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak keuangan.
- 5) Kecenderungan menguatnya nilai dollar US terhadap hampir semua mata uang di dunia, sehingga mendorong banyak investor mengalihkan dana mereka ke mata uang dollar US.
- 6) Mudah-mudahan masyarakat termakan isu, termasuk isu-isu non ekonomis yang terutama terjadi pada akhir tahun 1997.

Tahun 1998, nilai tukar rupiah mencapai Rp.8.025 atau mengalami depresiasi 72,58% dari tahun sebelumnya. Tekanan tersebut berkaitan dengan semakin lemahnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang tercermin dari tingginya tingkat inflasi (77,63%) dan dalamnya kontraksi ekonomi. Ekspansi moneter yang terjadi pada periode ini mendorong peningkatan permintaan di pasar valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar rupiah.

Rupiah kembali menguat pada tahun 1999. Nilai tukar rupiah menjadi Rp.7.100 atau menguat sebesar 11,53% dari tahun 1998. Kebijakan moneter khususnya dalam hal pengendalian likuiditas pada sistem perbankan dan perbaikan ekspektasi terhadap inflasi memiliki andil yang cukup penting pada proses menguatnya nilai tukar rupiah. Selain itu mulai pulihnya kondisi sosial politik dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemulihan ekonomi memberikan landasan yang kuat bagi kestabilan nilai tukar.

Kondisi politik yang cenderung membaik, khususnya setelah dikeluarkannya UU Politik, relatif lancarnya rangkaian pelaksanaan Pemilu 7 Juni 1999, yang semula dikhawatirkan membawa konsekwensi instabilitas sosial politik ternyata berjalan cukup lancar. Kondisi

tersebut berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Nilai tukar menguat sejalan dengan penyelenggaraan sidang umum MPR, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang berjalan lancar dan tertib. Semakin besar iklim keterbukaan pemerintah dalam berbagai hal, turut mengoreksi sentimen negatif pasar yang terjadi sebelumnya (Laporan Tahunan BI: 1999: Hal:72).

Pada tahun 2000, nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi yang tajam. Nilai rupiah melemah sekitar 35,14% dari tahun 1999, sehingga nilai tukar mencapai Rp.9.595 per dollar US. Terdepresiasi rupiah secara tajam diantaranya disebabkan oleh adanya konflik sosial politik yang tak terduga yang dimulai sejak awal April 2000.

Pada tahun 2001 nilai tukar rupiah kembali mengalami tekana depresiasi yang cukup besar yaitu sebesar 8,75%, dimana nilai tukar rupiah mencapai Rp.10.435 per dollar US. Besarnya tekanan depresiasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya country risk sejalan dengan memburuknya ketidakpastian kondisi sosial politik dalam negeri yang terjadi pada periode tersebut. Ketidakpastian situasi sosial politik dalam negeri semakin memburuk yang ditandai dengan terjadinya gejolak politik, serta beberapa kerusuhan sosial dan ancaman disintegrasi di beberapa daerah.

Analisis regresi

Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dana masyarakat, tingkat bunga kredit, cadangan wajib minimum, jumlah kantor bank, tingkat inflasi dan nilai tukar (kurs) terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah periode 1991-2001 digunakan metode perhitungan regresi linear sederhana. Secara matematis fungsi dari variabel diatas dapat ditulis sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kredit} &= f(\text{Dana Masyarakat, Tingkat Bunga Kredit, Cadangan Minimum,} \\ &\quad \text{Jumlah Kantor Bank, Tingkat Inflasi dan Kurs}) \\ K &= f(DM, i, RR, KB, In, Rp)\end{aligned}$$

Fungsi matematis diatas menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada penyaluran kredit (K) dipengaruhi oleh perubahan pada pengumpulan dana masyarakat (DM), tingkat bunga kredit (i), cadangan minimum (RR), jumlah kantor bank (KB), inflasi (In) dan kurs (Rp). Dimana dari fungsi matematis tersebut dengan menggunakan model perhitungan regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Kredit} &= \beta_0 + \beta_1 (\text{Dana Masyarakat}) + \beta_2 (\text{Tingkat Bunga Kredit}) + \beta_3 (\text{Cadangan} \\ &\quad \text{Minimum}) + \beta_4 (\text{Jumlah Kantor Bank}) + \beta_5 (\text{Inflasi}) + \beta_6 (\text{Kurs}) + \mu \\ Y &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \mu\end{aligned}$$

Di mana:

Y : Penyaluran Kredit

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien dana masyarakat terhadap penyaluran kredit

X_1 : Dana masyarakat

- β_2 : Koefisien tingkat bunga kredit terhadap penyaluran kredit
 X_2 : Tingkat bunga kredit
 β_3 : Koefisien cadangan minimum terhadap penyaluran kredit
 X_3 : Cadangan minimum
 β_4 : Koefisien jumlah kantor bank terhadap penyaluran kredit
 X_4 : Jumlah kantor bank
 β_5 : Koefisien inflasi terhadap penyaluran kredit
 X_5 : Inflasi
 β_6 : Koefisien kurs terhadap penyaluran kredit
 X_6 : Kurs
 μ : Error term

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = -59448,316 - 3,620(X_1) - 1082,860(X_2) + 2949,006(X_3) + 118,910(X_4) + 968,099(X_5) - 4,185(X_6)$$

(37639,65)	(0,206)	(1642,045)	(4009,81)	(20,52)	(154,878)	(6,96)	S.E
(-1,579)	(-0,176)	(-0,659)	(0,735)	(5,794)	(6,251)	(-0,602) ..	t-stt

$$t\text{-Tabel} = 1,796$$

$$R^2 = 0,979$$

Hasil uji regresi yang melibatkan dana masyarakat, tingkat bunga kredit, cadangan minimum, jumlah kantor bank, inflasi dan kurs sebagai variabel independen dan penyaluran kredit sebagai variabel dependen menghasilkan persamaan linier diatas. Nilai konstanta negatif sebesar -59448,316 berarti bahwa jika dana masyarakat (X_1), tingkat bunga kredit (X_2), cadangan minimum (X_3), jumlah kantor bank (X_4), inflasi (X_5) dan kurs (X_6) sama dengan 0 maka kredit akan turun sebesar 59448,316.

Koefisien X_1 (dana masyarakat) sebesar -3,620 menunjukkan bahwa pengaruh dana masyarakat terhadap kredit bersifat negatif, yaitu mengandung arti bahwa jika variabel dana masyarakat meningkat sebesar 1 persen maka variabel kredit akan turun sebesar 3,620.

Dengan menggunakan pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa dana masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik sebesar -0,176 dan t-tabel sebesar 1,796. Dengan kata lain t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-0,176 < 1,796$), dengan demikian dana masyarakat secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis awal menyatakan bahwa adanya hubungan erat antara dana masyarakat terhadap penyaluran kredit dimana jika dana masyarakat meningkat maka penyaluran kredit juga meningkat, pada hasil perhitungan ternyata diperoleh hasil bahwa variabel dana masyarakat secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, karena itu hipotesis awal ditolak karena dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik tidak signifikan.

Koefisien X_2 (tingkat bunga kredit) sebesar -1082,860 menunjukkan bahwa pengaruh tingkat bunga kredit terhadap penyaluran kredit bersifat negatif, yaitu mengandung arti bahwa jika variabel tingkat bunga kredit meningkat sebesar 1 persen maka variabel kredit akan turun sebesar 1082,860.

Pada pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa tingkat bunga kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik sebesar -0,659 dan t-tabel sebesar 1,796. Dengan kata lain t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-0,659 < 1,796$), dengan demikian tingkat bunga kredit secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis awal menyatakan bahwa adanya hubungan erat antara bunga kredit terhadap penyaluran kredit dimana jika bunga kredit meningkat maka penyaluran kredit akan turun, pada hasil perhitungan ternyata diperoleh hasil bahwa variabel bunga kredit secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, karena itu hipotesis awal ditolak karena dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik tidak signifikan.

Koefisien X_3 (cadangan minimum) sebesar 2949,006 menunjukan bahwa pengaruh variabel cadangan minimum terhadap kredit bersifat positif, yaitu mengandung arti bahwa jika variabel cadangan minimum meningkat sebesar 1 persen maka variabel kredit akan meningkat sebesar 2949,006.

Pada pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa cadangan minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik sebesar 0,735 dan t-tabel sebesar 1,796. Dengan kata lain t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($0,735 < 1,796$), dengan demikian cadangan minimum secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis awal menyatakan bahwa adanya hubungan erat antara cadangan minimum terhadap penyaluran kredit dimana jika cadangan minimum meningkat maka penyaluran kredit akan turun, pada hasil perhitungan ternyata diperoleh hasil bahwa variabel cadangan minimum secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, karena itu hipotesis awal ditolak karena dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik tidak signifikan.

Koefisien X_4 (jumlah kantor bank) sebesar 118,910 menunjukan bahwa pengaruh jumlah kantor bank terhadap kredit bersifat positif, yaitu mengandung arti bahwa jika variabel jumlah kantor bank meningkat sebesar 1 persen maka variabel kredit akan naik sebesar 118,910.

Dengan menggunakan pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa jumlah kantor bank berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik sebesar 5,794 dan t-tabel sebesar 1,796. Dengan kata lain t-statistik lebih besar dari t-tabel ($5,794 > 1,796$), dengan demikian jumlah kantor bank secara statistik signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis awal menyatakan bahwa adanya hubungan erat antara jumlah kantor bank terhadap penyaluran kredit dimana jika jumlah kantor bank meningkat maka penyaluran kredit juga meningkat, pada hasil perhitungan ternyata diperoleh hasil bahwa variabel jumlah kantor bank secara statistik signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank

Pemerintah di Indonesia, karena itu hipotesis awal diterima karena dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik signifikan.

Koefisien X_5 (inflasi) sebesar 968,099 menunjukkan bahwa pengaruh variabel inflasi terhadap kredit bersifat positif, yaitu mengandung arti bahwa jika variabel inflasi meningkat sebesar 1 persen maka variabel kredit akan naik sebesar 968,099.

Dengan menggunakan pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik sebesar 6,251 dan t-tabel sebesar 1,796. Dengan kata lain t-statistik lebih besar dari t-tabel ($6,251 > 1,796$), dengan demikian inflasi secara statistik signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis awal menyatakan bahwa adanya hubungan erat antara inflasi terhadap penyaluran kredit dimana jika inflasi meningkat maka penyaluran kredit akan turun, pada hasil perhitungan ternyata diperoleh hasil bahwa variabel inflasi secara statistik signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, karena itu hipotesis awal diterima karena dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik signifikan.

Koefisien X_6 (kurs) sebesar -4,185 menunjukkan bahwa pengaruh kurs terhadap kredit bersifat negatif, yaitu mengandung arti bahwa jika variabel kurs meningkat sebesar 1 persen maka variabel kredit akan turun sebesar 4,185.

Dengan menggunakan pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik sebesar -0,602 dan t-tabel sebesar 1,796. Dengan kata lain t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-0,602 < 1,796$), dengan demikian kurs secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia.

Berdasarkan hipotesis awal menyatakan bahwa adanya hubungan erat antara kurs terhadap penyaluran kredit dimana jika kurs rupiah menguat (depresiasi turun) maka penyaluran kredit juga meningkat, pada hasil perhitungan ternyata diperoleh hasil bahwa variabel kurs secara statistik tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, karena itu hipotesis awal ditolak karena dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut secara statistik tidak signifikan.

Besarnya pengaruh dana masyarakat, tingkat bunga kredit, cadangan minimum, jumlah kantor bank, inflasi dan kurs terhadap penyaluran kredit pada bank Pemerintah di Indonesia dapat dilihat dari koefisien determinasi atau *R square* (R^2). Dari hasil regresi diperoleh R^2 sebesar 0,979. Ini menyatakan bahwa pengaruh dana masyarakat, tingkat bunga kredit, giro wajib minimum, jumlah kantor bank, inflasi dan kurs terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah periode 1991-2001 sebesar 97,9 persen disebabkan (dijelaskan) oleh variabel dana masyarakat, bunga kredit, cadangan minimum, jumlah kantor bank, inflasi dan kurs, sedangkan sisanya 2,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel-variabel yang telah disebutkan diatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya LDR perbankan diantaranya disebabkan oleh : 1. Masih tingginya porsi obligasi pemerintah dalam aset perbankan; 2. Masih berlangsungnya upaya konsolidasi internal perbankan; 3. Lambatnya proses restrukturisasi kredit serta korporasi; 4. Rendahnya daya serap sektor riil terhadap penyaluran kredit perbankan sejalan dengan menurunnya kepercayaan dunia bisnis.

Selain faktor-faktor diatas secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada Bank Pemerintah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ditinjau dari (1). Sisi permintaan kredit (*ekstern*), antara lain Tingkat Bunga Kredit dan Inflasi serta Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar; dan (2). Sisi penawaran kredit (*intern*) antara lain Cadangan Wajib Minimum (GWM/RR), Jumlah Kantor Bank Pemerintah dan Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Bank Pemerintah.

Dari hasil analisis penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda (Program SPSS 11.0) diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Dari hasil pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa dana masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-0,176 < 1,796$).
- b. Dari hasil pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa bunga kredit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-0,659 < 1,796$).
- c. Dari hasil pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa cadangan minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($0,735 < 1,796$).
- d. Dari hasil pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa jumlah kantor bank berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ($5,794 > 1,796$).
- e. Dari hasil pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ($6,251 > 1,796$).
- f. Dari hasil pengujian statistik dengan Uji-t, diketahui bahwa kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada Bank Pemerintah di Indonesia, dimana nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ($-0,602 < 1,796$).
- g. Dari hasil regresi diperoleh R^2 sebesar 0,979. Ini menyatakan bahwa sebesar 97,9 persen variabel penyaluran kredit disebabkan (dijelaskan) oleh variabel dana masyarakat, bunga kredit, cadangan minimum, jumlah kantor bank, inflasi dan kurs, sedangkan sisanya 2,1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel-variabel yang telah disebutkan diatas.

Saran-saran

Pemerintah dapat menetapkan berbagai kebijakan dibidang perbankan yang dapat membuat dunia perbankan bergairah dalam usahanya dengan persaingan yang sehat.

Bank sentral diharapkan ikut dalam mengawasi bank pemerintah dalam menentukan suku bunga kredit riil yang akan ditetapkan, sehingga tidak terjadi kredit macet yang dapat mengganggu perekonomian dan menghambat penyaluran kredit oleh bank pemerintah.

Pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas lebih kepada bank pemerintah mengingat bank pemerintah tidak hanya mengambil keuntungan tetapi juga mengembangkan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia Berbagai Edisi, Jakarta.
- Bank Indonesia, Makalah BI: Kebijakan dan Perkembangan Moneter Indonesia, Jakarta, 2001.
- Binhadi, "Piranti Moneter Dalam Rangka Stabilisasi Moneter", SESPIBANK, Jakarta, 1989.
- Biro Pusat Statistik, Laporan Ekonomi dan Keuangan, Berbagai Edisi.
- Camma, Adipati, Peranan deposito Bagi Pendanaan Bank dan Hubungannya Dengan Tingkat Suku Bunga, Lembaga Pengembangan Perbankan, Sept-Okt 1991.
- Latumaerissa, Julius R, Mengenai Aspek-Aspek Operasi Bank Umum, Bumi Aksara, Surabaya, 1999.
- Muhainy Hanafiah, Enny, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.
- Nasution, Anwar, Dunia Perbankan, InfoBank, 1995.
- Nasution, Anwar, Tinjauan Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 Pada Sistem Keuangan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Nopirin, Ekonomi Moneter, Jilid I, Yogyakarta, BPFE, 1998.
- Rachbini, Didik J, Pembinaan Pengusaha Kecil: Akses Terhadap Modal dan Perkreditan, Manajemen dan Usahawan, No.5 Thn.XXII Mei 1994,1994.
- Roswita AB, Ekonomi Moneter : Teori, Masalah dan Kebijakan, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.
- Roswita AB, Nurkadina Novalia, Seluk Beluk Pasar Modal Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1999.
- Sabirin,Syahril, Makalah: Upaya Memobilisasi Dana Masyarakat, Jakarta, 1995.
- Sukirno,Sadono, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, LPFE Univ. Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sukirno,Sadono, Pengantar Teori Makro Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Tjoekam, H. Moh, Perkreditan : Bisnis Inti Bank Komersil, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998.